



Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Krisna Rasyid Al Fittoh^{1*}, Anisa Qurрата' Ayun², Lintang Ahmad Mustika Aji³

^{1,2,3}Universitas Ahmad Dahlan

*Corresponding Author: krisna2000031020@webmail.uad.ac.id

Article History

Received: 30-07-2023

Accepted: 21-12-2023

Published: 30-12-2023

Keywords:

Concept, Policy, Education

Kata Kunci:

Konsep, Kebijakan, Pendidikan

Abstract:

Education policy is an important matter in the process of achieving national education goals so that an understanding of the basic concepts of education policy is needed in order to produce educational policies that are proactive and problem solving. The purpose of writing this article is to study the scope of education policy which consists of the definition of education policy, components of education policy, implementation of education policy and objectives of education policy. This writing methodology uses a literature study methodology. This article was written by reviewing 12 journals related to education policy. The results of the study found that educational policy is a policy related to the field of education in the process of elaborating the vision and mission of education to achieve educational goals through strategic steps in implementing education. The education policy has the character of its own goals which include having instructive goals, having a proper point of view, having operational ideas, being made by experts, being able to be assessed clearly, and having a systematic approach. pecifically to carry out intending to achieve something.

Abstrak:

Kebijakan pendidikan merupakan hal penting dalam proses pencapaian pendidikan nasional tujuan sehingga pemahaman tentang konsep dasar kebijakan pendidikan diperlukan dalam rangka menghasilkan kebijakan pendidikan yang proaktif dan pemecahan masalah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mempelajari ruang lingkup kebijakan pendidikan yang terdiri dari definisi kebijakan pendidikan, komponen kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan dan tujuan kebijakan pendidikan. Metodologi penulisan ini menggunakan studi literatur metodologi. Penulisan artikel ini dilakukan dengan meninjau 12 jurnal yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dalam proses menjabarkan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tujuan melalui langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan itu memiliki karakter tujuan tersendiri yang di antaranya, memiliki tujuan instruktif, memiliki sudut pandang yang layak, memiliki ide oprasional, dibuat para ahli, bisa dinilai secara jelas, dan memiliki sistematika. Khusus untuk melaksanakan bermaksud untuk mencapai sesuatu.

How to cite : Al Fittoh, K. R., Ayun, A. Q., & Mustika Aji, L. A. (2023). *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*. Journal of Education Management Research, 1(2), 57–64. Retrieved from <https://journal.cahyaedu.com/index.php/jemr/article/view/21>

DOI : -

License : This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-SA)

PENDAHULUAN

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kita tahu, jika dilihat dari kacamata pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau sering ditemukan berbagai problematika pendidikan di Indonesia, baik dari permasalahan kurikulum, kualitas kompetensi, bahkan kompetensi kepemimpinan sering terjadi permasalahan. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitiannya (Nasution, 2019) menjelaskan bahwa berbagai kasus keluhan-keluhan yang kini sering terjadi di lapangan kian menunjukan bahwa dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja, yang dimana pimpinan sekolah atau pun pendidik masih mementingkan jabatan daripada nasib pendidikan di masa depan.

Masih membahas terkait persoalan pendidikan di Indonesia, pada penelitian (Amelia, 2019) juga menjelaskan bahwa kesenjangan pendidikan juga menjadi permasalahan yang sering ditemui, yang *pertama*, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pendidik dan peserta didik yang tidak dapat menunjang proses pembelajaran yang kondusif menjadi faktor utama dalam mempengaruhi berhasil atau tidaknya pendidikan karena faktanya pendidikan tidak berjalan dengan lancar, *kedua*, masalah kurikulum kini sering terjadi pergantian kurikulum yang memberikan dampak sangat merepotkan bagi pendidik yang harus menyesuaikan kurikulum terbaru juga bagi peserta didik yang harus dipaksa menyesuaikan dengan kurikulum yang terlalu kompleks. Dengan itu jelas-jelas dapat kita lihat dengan seksama bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih menunjukan kualitas yang sangat rendah.

Adanya problematika pendidikan yang ada di Indonesia kian sangat memprihatinkan, dengan itu pemerintah menegaskan kebijakan-kebijakan untuk menunjang berbagai permasalahan pada kualitas pendidikan yang kini sangat disayangkan. Pada penelitian (Baro'ah, 2020) menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dijalankan dan ditetapkan oleh pemerintah yaitu kebijakan merdeka belajar, yang dimana kebijakan ini memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam memperoleh pendidikan yang bermutu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang dimilikinya.

Selain kebijakan merdeka belajar, kebijakan pendidikan yang telah dijalankan,

pada jenjang sekolah menengah pertama juga di terapkan, yang dimana kebijakan tersebut adalah kebijakan penerapan sistem zonasi, bahwa peserta didik yang berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam dirinya dengan melalui proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dalam hal ini sistem zonasi diberlakukan dengan menerapkan nilai calon peserta didik, tetapi lebih ditekankan lagi dengan mematok pada jarak antara rumah peserta didik dengan sekolah. Tujuan dari sistem zonasi ini yaitu untuk memberikan kualitas pendidikan yang terbagi dengan rata dan dapat menyebar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, menyamaratakan derajat sekolah yang dianggap unggul dan tidak unggul, dan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata rata di patok dengan memasuki sekolah yang berada pada lingkup zona yang ada di daerah masing-masing(Hasbullah & Anam, 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu untuk menjadikan landasan yang ditetapkan sebagai suatu aturan dalam segi pendidikan supaya dapat menciptakan kesesuaian antara kebutuhan dengan kondisi dalam pendidikan dan kualitas pendidikan yang baik dapat tercipta karena adanya peraturan pendidikan yang baik juga.

METODE PENELITIAN

Jenis penenelitian pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersumber pada paradigma yang berlaku, digunakan dalam meneliti suatu sumber yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian (Darmalaksana, 2020).

Penelitiannya(Rukminingsih et al., 2020) juga menegaskan terkait penelitian kualitatif bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman akan fakta yang didapatkan dari penelitian tersebut. Inti dari pada metode penelitian kualitatif yaitu, metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian berhubungan dengan data seperti kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme secara alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai tokoh utama atau instrumen utama, dengan itu peneliti harus memiliki wawasan yang luas sehingga dapat menganalisis, mengkritis dan menggali informasi secara jelas.

Studi literatur merupakan intisari tertulis menyangkut baik artikel, jurnal, buku yang menjelaskan tentang teori serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis

data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi literature (Levitt dkk., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan Kebijakan merupakan sebuah proses dalam Menyusun Langkah dalam penerapan sistem pendidikan agar pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Sepertihalnya di dalam kehidupan yang semestinya terdapat kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas sehingga menjadi lebih jelas dan terarah.

Dalam penelitian (Alfirzan et al., 2021) juga menjelaskan bahwa “kebijakan yang mengatur terkait sistem pendidikan dilahirkan dengan tujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pendidikan serta mengembangkan pendidikan yang inovatif.” Kebijakan pendidikan mempunyai wewenang dalam mengelola bidang pendidikan yang berhubungan dengan tempat dan penyaluran sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan. Dengan itu kebijakan pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan dan bidang pendidikan mempunyai hubungan dan mempunyai visi Misi serta tujuan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang strategis.

Kebijakan yang baik didasarkan pada potensi dalam memahami pelajaran serta pengalaman dan menerapkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Behubungan dengan kebijakan yang ada di Indonesia, yang dimana alat untuk mencapai sebuah tujuan, artinya dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan seperangkat Tindakan pemerintah yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang sudah di impikan. Dengan demikian kebijakan yang sifatnya baik adalah kebijakan yang memperhitungkan dan merencanakan kemampuan di lapangan.(Bakry, 2010)

Penjelasan di atas sudah menjelaskan terkait definisi kebijakan pendidikan, salah satunya persoalan yang ada di bidang pendidikan. Sebenarnya kebijakan pendidikan terbagi menjadi 2 bagian yaitu, kebijakan pendidikan sebagai publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Dimana kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik mempunyai ciri diantaranya: kebijakan yang dibuat oleh negara, kebijakan yang ditunjukkan untuk menegatur kehidupan bersama dan kebijakan untuk mengatur masalah Bersama. (Arwildayanto et al., 2018)

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pengertian dari implementasi kebijakan pendidikan merupakan bagaimana cara memahami kebijakan secara benar. Dalam hal ini proses implementasi kebijakan terdapat beberapa aspek, yaitu ada teori dan model implementasi kebijakan, pendekatan dalam implementasi kebijakan, langkah langkah implementasi, faktor faktor pelaksanaan kebijakan, serta tantangan dan kendala dalam keberhasilan implementasi kebijakan. (Elih, 2020).

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yaitu ada memiliki tujuan instruktif, memiliki sudut pandang yang layak, memiliki ide oprasional, dibuat para ahli, bisa dinilai secara jelas, dan memiliki sistematika. Secara etimologis, kata *execution* ketika disinggung dari referensi *Word Webster*, khusus untuk melaksanakan bermaksud untuk mencapai sesuatu. Dengan cara yang sama, eksekusi strategi adalah tahap pragmatis daripada rencana masalah atau definisi strategi sebagai tahap hipotetis (Aulia et al., 2021).

C. Tujuan Kebijakan Pendidikan

Tujuan Kebijakan PendidikanKebijakan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini pada penelitian (Setiawan dkk, 2022) menjelaskan beberapa tujuan kebijakan pendidikan:

1. Tujuan Kebijakan Didasarkan Pada Tingkat Masyarakat
yaitu Kebijakan yang mampu mengarahkan individu menjadi yang lebih berpotensi, selain itu dalam kebijakan masyarakat juga dilatih dalam penerapan nilai nilai positif.
2. Tujuan Kebijakan didasarkan pada tingkat politisi
Pendidikan sangat berkontribusi dalam mengembangkan potensi peserta didik dalam ranah politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Selain itu juga membangun kesadaran peserta didik menjadi warga yang bertanggung jawab.
3. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkat ekonomi
Pendidikan menjadikan sarana dalam mengembangkan ekonomi, seperti halnya dalam membantu peserta didik dalam menekuni keterampilan yang dibutuhkannya. Dengan hal itu seseorang yang semakin berpendidikan maka tingkat penghasilannya juga akan semakin baik dan berkualitas.

D. Komponen Kebijakan Pendidikan

Selain dijelaskan mengenai beberapa tujuan kebijakan pendidikan, dalam hal ini, komponen kebijakan pendidikan juga dijelaskan menurut, penelitiannya Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu:

1. **Goal (Tujuan)**

adalah hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat dengan mudah diterima.

2. **Plans (Rencana)**

adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat untuk proses manajemen dan penerapan Konsep dasar kebijakan pendidikan kebijakan pendidikan.

3. **Programme (Program)**

merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang nyata dengan didasarkan pada tujuan yang telah di *desain* atau dibentuk sebelumnya. Dalam hal ini, program merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melihat tingkat peluang keberhasilan

4. **Decision (Keputusan)**

merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba alternatif-alternatif kebijakan pendidikan.

5. **Effects (Dampak)**

merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa dampak primer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Dari beberapa komponen di atas yang telah disebutkan dan dijelaskan, bahwasannya, komponen-komponen ini lah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah proses dalam menyusun langkah dalam penerapan sistem pendidikan agar pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Kebijakan pendidikan terbagi menjadi 2 bagian yaitu, kebijakan pendidikan sebagai publik dan kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik. Ada 5 komponen kebijakan pendidikan diantaranya, *Goal* (tujuan), *plans* (Rencana), *progamme* (Program), *decision* (Keputusan), *efect* (Dampak). Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan bagaimana cara memahami kebijakan secara benar. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus diantaranya ada memiliki tujuan instruktif, memiliki sudut pandang yang layak, memiliki ide oprasional, dibuat para ahli, bisa dinilai secara jelas, dan memiliki sistematika.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.
- Amelia, C. (2019). *Problematika Pendidikan Indonesia*. 3.
- Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan* (E. Kuswandi (ed.); pertama).
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Piblik. *Jurnal MEDTEK*, 2.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*.
- Hasbullah, & Anam, S. (2019). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan*. 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1413>
- Nasution, E. (2019). Problematika pendidikan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon* |2, 1–10.
- Rukminingsih, Adnan, G., & Latief, M. A. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan* (E. Munastiwi & H. Ardi (eds.)).
- Sufiyana, Z, A., Moh, Muslim, Amalda, F, N. (2022). Strategi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam DI MTs NEGERI BATU Pada Era Milenial. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(10), 93.
- Sumar, T, W., Sukining, A., Arwildayanto. *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif*, Bandung: C.V CENDEKIA PRESS, 2018 hal. 10-11

Copyright Holder:

© Anisa Qurrata' Ayun, Lintang Ahmad Mustika Aji, Krisna Rasyid Al Fittoh. (2023)

First Publication Right:

© Journal of Education Management Research (JEMR)

This article is under:

